

**PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM ERA OTONOMI DAERAH SEBAGAI SUMBER
PEMBELAJARAN BIOLOGI POKOK BAHASAN
EKOSISTEM**



Skripsi

**Diajukan Kepada Program Studi Pendidikan Biologi
Jurusan Tadris MIPA Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Dalam Ilmu Pendidikan Biologi**

Disusun oleh:

Athourakhman

NIM. 0045 0221

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
JURUSAN TADRIS MIPA FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Athourakhman

NIM : 0045 0221

Fakultas : Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini (tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan skripsi saya ini) adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain.

Yogyakarta, 24 Juni 2005

Yang menyatakan



Athourakhman
NIM. 0045 0221

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Andhika P Nugroho, M. Si.
Dosen Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga
NOTA DINAS PEMBIMBING
Hal : Skripsi
Saudara Athourakhman

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr, wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara

Nama : Athourakhman

NIM : 0045 0221

Jurusan : Tadris Program Studi Pendidikan Biologi

Judul : PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM ERA OTONOMI DAERAH SEBAGAI SUMBER
PEMBELAJARAN BIOLOGI POKOK BAHASAN
EKOSISTEM

telah dapat diajukan kepada Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pendidikan Biologi.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosah. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr, wb.

Yogyakarta, 24 Juni 2005
Pembimbing,



Andhika P Nugroho, M. Si.
NIP. 132 225 120

Drs. Sukiman, M.Pd.
Dosen Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga
NOTA DINAS KONSULTAN
Hal : Skripsi
Saudara Athourakhman

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr, wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara

Nama : Athourakhman

NIM : 0045 0221

Jurusan : Tadris Program Studi Pendidikan Biologi

Judul : PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM ERA OTONOMI DAERAH SEBAGAI SUMBER
PEMBELAJARAN BIOLOGI POKOK BAHASAN
EKOSISTEM

Sudah sapat diterima untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam. Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Wassalamualaikum wr, wb.

Yogyakarta, 1 Agustus 2005

Konsultan


Drs. Sukiman, M.Pd.
NIP. 150 282 518



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS TARBIYAH

Jln. Laksda Adisucipto, Telp. : (0274) 513056, Fax. (0274) 519734 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/ DT/ PP. 01. 1/604/05

Skripsi dengan judul : PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM ERA OTONOMI DAERAH SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN BIOLOGI POKOK BAHASAN EKOSISTEM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

ATHOUROKHMAN

NIM :0045 0221

Telah dimunaqosyahkan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Juli 2005

Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Sedyo Santoso, S.S., M.Pd.

NIP: 150 249

Sekretaris Sidang

Drs. Murtono, M.Si.

NIP: 150 299 966

Pembimbing Skripsi

Andhika P Nugroho, M.Si.

NIP: 132 225 120

Penguji I

Drs. Sukirman, M.Pd.

NIP : 150 282 518

Penguji II

Arifah Khusnuryani, M.Si.

NIP : 150 301 490

Yogyakarta, 3. Agustus 2005

UIN SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS TARBIYAH

DEKAN



Drs. Rahmat, M.Pd.

NIP : 150 037 930

MOTTO

❖ Q. S. Ar-Rum : 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي
النَّاسِ لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya :

“ Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) dari perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) “¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya : UD Mekar, 2000), hal 647.

Halaman Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Fakultas Tarbiyah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أَهْوَالِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. إِنَّمَا بَعَدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ilahi rabbi, yang hanya kepadaNya lah penulis selalu mohon pertolongan baik dalam masalah dunia ataupun akhirat, dan mohon perlindungannya dari kejahatan hawa nafsu dan perbuatan yang dilarang-Nya.

Sholawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita; Nabi Muhammad saw, dan juga kepada seluruh ahli bait serta seluruh ummat yang mengikuti ajarannya.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang pengelolaan hutan di kabupaten Temanggung dalam era otonomi daerah sebagai sumber pembelajaran biologi. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga beserta stafnya.

2. Ibu Ketua, Sekretaris dan Kepala program studi Jurusan Pendidikan Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Andika P Nugroho, M. Si. selaku pembimbing skripsi.
4. Bapak Drs. Jauhar Hatta, M.Ag. selaku pembimbing akademik.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga.
6. Dinas Perkebunan, Kehutanan, dan Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Temanggung.
7. Perhutani BKPH Temanggung
8. Perhutani BKPH Candirot
9. KH. Asyhari Marzuki (alm) beserta Ibu nyai, Hj. Barokah Asyhari. yang telah memberi semangat dalam mengapai suatu tujuan.
10. Kedua orang tuaku dan juga adik-adikku yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini, makasih atas doa-doanya.
11. Dewan asatidz, serta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, dan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah swt. Amin.

Yogyakarta, 23 Mei 2005.


Athourakhman
NIM. 0045 0221

**PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM
ERA OTONOMI DAERAH SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN
BIOLOGI POKOK BAHASAN EKOSISTEM**

ABSTRAKSI
ATHOUROKHMAN
0045 0221

Sudah menjadi kodrat manusia bahwa manusia tidak akan pernah puas dengan suatu keinginan. Manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika sudah terpenuhi satu kebutuhan maka akan muncul lagi keinginan untuk memiliki yang lainnya. Oleh karena itu manusia akan selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mereka.

Hutan merupakan salah satu dari komponen lingkungan yang menjadi korban ketika manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia maka keberadaan hutan semakin terancam. Padahal hutan merupakan salah satu komponen utama yang harus dimanfaatkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia agar dapat tetap memanfaatkan hutan tanpa menimbulkan kerusakan pada hutan adalah mengelola hutan dengan sebuah pengelolaan yang berkesinambungan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dilakukan dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di hutan yang terdapat di Kabupaten Temanggung.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di kabupaten Temanggung bahwa pengelolaan hutan dilaksanakan dengan sistem PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Dalam sistem ini masyarakat mengelola lahan hutan dengan menanam berbagai jenis tanaman seperti kopi, kacang-kacangan, padi dan jagung. Sehingga pengelolaan hutan bukan pengelolaan yang berorientasi pada kayu. Dengan sistem ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan hutan sekaligus menjaga keberadaannya.

Proses dan produk dari penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif sumber pembelajaran biologi dalam pokok bahasan ekosistem dan peranan manusia dalam keseimbangannya di SMA maupun MA.

Kata Kunci : Pengelolaan hutan' otonomi daerah, di Kabupaten Temanggung dan sumber pembelajaran Biologi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS KONSULTAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAKSI.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Istilah.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan.....	10
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : GAMBARAN UMUM HUTAN DI KABUPATEN	
TEMANGGUNG.....	22
A. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Temanggung.....	22

B. Hutan Negara Yang berada di Daerah Kabupaten Temanggung.....	24
C. Gambaran Umum Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Di BKPH Temanggung.....	25
D. Gambaran Umum Hutan Negara Di Resot Pemangkuan Hutan (RPH) Di BKPH Candirototo.....	26
E. Gambaran Umum Hutan Rakyat Di Daerah Kabupaten Temanggung	28
BAB III: PENGELOLAAN HUTAN DI DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM ERA OTONOMI DAERAH	
1. Pengelolaan Hutan Di BKPH Temanggung.....	38
2. Pengelolaan Hutan Di BKPH Candirototo.....	43
3. Pengelolaan Hutan Rakyat Di Kabupaten Temanggung.....	45
BABIV: PENGELOLAAN HUTAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN	
50	50
BAB V : KESIMPULAN	
1. Kesimpulan	57
2. Harapan	58
3. Saran-saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

BKPH	: Badan Kesatuan Pemangku Hutan
DPL	: Diatas Permukaan Laut
Ha	: Hektar
HL	: Hutan Lindung
HOK	: Hari Orang Kerja
HPT	: Hutan Produksi Terbatas
KBK	: Kurikulum Berbasis Kompetensi
KPH	: Kesatuan Pemangku Hutan
PHBM	: Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
RBC	: Rimba Campuran
RP	: Rencana Pembelajaran
RPH	: Resort Pemangku Hutan
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SKSHH	: Surat Keterangan Sah Hasil Hutan
TGH	: Tata Guna Hutan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Istilah

Dalam studi ini akan diungkap tentang bagaimana pengelolaan hutan dalam era otonomi daerah di wilayah kabupaten Temanggung. Agar tidak terjadi kerancuan dan salah pengertian dalam memahami studi ini perlu kiranya penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini :

1. Pengelolaan : Berasal dari kata “kelola” (mengelola) berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, mengusahakan, supaya lebih baik, lebih maju, dan sebagainya serta bertanggung jawab penuh atas pekerjaan tertentu. Sedangkan “pengelolaan” berarti proses, cara, atau perbuatan mengelola.¹
2. Era : Masa, kurun waktu dalam sejarah.²
3. Otonomi : Mengurus urusan sendiri (rumah tangga) sendiri, pelaksanaan pemerintahan sendiri.³
4. Daerah : Bagian permukaan bumi dalam kaitannya dengan keadaan alam dan sebagainya; lingkungan pemerintahan; wilayah daerah kabupaten, daerah propinsi.⁴

¹ Petersalim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi pertama* (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal 694,695.

² Petersalim dan Yenny Salim, *ibid*, hal. 404

³ Pius A Partanto dan M Dahlan AL Barry, *Buku Kamus Terlaris Kamus Populer* (Surabaya : Arloka,1994), hal.552.

⁴ Petersalim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi pertama* (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal. 306.

5. Otonomi Daerah : Menurut UU NO.22 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan perundang-undangan.
6. Hutan : Tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon liar; adj liar ; tidak di pelihara orang.⁵
7. Kabupaten Temanggung terletak diantara $110^{\circ} 23' - 110^{\circ} 46' 30''$ bujur timur dan $7^{\circ} 14' - 7^{\circ} 32' 35''$ lintang selatan. Sebagian besar daerah ini berhawa dingin karena terletak di lereng gunung Sindoro dan gunung Sumbing. Wilayah kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Wonosobo dan kabupaten Magelang di sebelah Selatan, kabupaten Kendal di sebelah Utara dan kabupaten Semarang di sebelah Timur.
8. Sumber : Tempat asal dari mana sesuatu datang.⁶
9. Pembelajaran berasal dari kata “belajar” yang berarti proses pembentukan tingkah laku secara terorganisir.⁷ Menurut aliran tradisional belajar diartikan dengan usaha memperoleh pengetahuan.⁸ Sedangkan menurut aliran modern belajar adalah proses perubahan tingkahlaku berkat interaksi dengan lingkungan.⁹

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, hal. 520.

⁶ Badudu Jusuf Syarief, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* hal. 1372.

⁷ Mahfud Salahuddin, *Pengantar Psikologi Pendidikan* (Surabaya, Bina Ilmu, 1990), hal.28.

⁸ Mahfudf Salahuddin, *Ibid*, hal 29.

⁹ Mahfud Salahuddin, *Ibid*, hal 30.

10. Sumber belajar : Menurut Djohar,¹⁰ yang dimaksud dengan sumber belajar adalah semua objek yang dapat digunakan untuk memperoleh pengalaman belajar siswa tentang permasalahan tertentu

Berdasarkan penegasan istilah di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pengelolaan hutan yang berada di kabupaten Temanggung dalam era otonomi daerah. Dari hasil penelitian ini kemudian dijadikan sebagai sumber pembelajaran bagi siswa SMA maupun MA kelas x mata pelajaran Biologi pokok bahasan ekologi.

B. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya jumlah penduduk berarti meningkat pula kebutuhan makanan, sandang, dan tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendayagunakan alam yakni hutan, tanah, dan air. Hal ini secara langsung atau tidak langsung akan menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam.¹¹

Sudah menjadi kodrat manusia bahwa manusia tidak akan pernah puas dengan suatu keinginan. Manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika sudah terpenuhi satu kebutuhan maka akan muncul lagi keinginan untuk memiliki yang lainnya. Oleh karena itu manusia akan selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mereka.

¹⁰ Djohar, *Meningkatkan Daya Guna Dan Hasil Guna Pemanfaatan Sumber Belajar (Makalah Lokakarya Pengabdian Masyarakat)*.(Yogyakarta:PPM IKIP,1984), hal. 4.

¹¹ Iwayan Dirpha, *Strategi Delinasi Ulang Kawasan Lampung*, Editor San Afri Awang dkk *Otonomi Sumberdaya Hutan* (Yogyakarta: Debut Press, 2001), hal.97.

Hal ini bukan hanya menjadi keinginan individu seseorang saja, akan tetapi juga menjadi keinginan bagi pemerintah. Pemerintah akan selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita baik untuk rumah tangga pemerintahan itu sendiri maupun pendapatan masyarakatnya.

Salah satu usaha pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya ialah dengan program otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, suatu daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu alasan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia karena Indonesia merupakan negara kesatuan yang sangat luas yang terdiri dari daerah kepulauan yang mempunyai kelebihan tersendiri sehingga pemerintah memberikan keluasaan pada setiap pemerintah daerah untuk mengelola potensi masing-masing daerahnya. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹²

Pelaksanaan otonomi daerah dalam wilayah kabupaten dan daerah kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan

¹² Deddy Supriady Barata Kusumah dan Dadan Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2001), hal. 1.

keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya, yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sedangkan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dalam bidang tertentu, dan secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sesuai antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara Republik Indonesia.

Alasan munculnya otonomi daerah adalah adanya kesenjangan antar daerah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembangunan baik itu fisik maupun ekonomi di negara kita tidak memenuhi asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari pertumbuhan pembangunan dan ekonomi yang terpusat di pulau Jawa. Sedangkan daerah di wilayah Indonesia di bagian Timur belum menikmati dari hasil pembangunan secara nyata. Padahal kekayaan alam yang dimiliki daerah tersebut telah dieksploitasi oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan belum adanya pemerataan hasil pembangunan yang selanjutnya menjadikan kesenjangan antar daerah yang bisa mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa.

Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, daerah mempunyai sumber-sumber yang dapat digunakan untuk pembiayaan pemerintahan daerah, antara lain

- 1) Pendapatan Asli Daerah, seperti pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain.
- 2) Dana Perimbangan, seperti dana alokasi baik umum maupun khusus, dan penerimaan dari sumber daya alam.
- 3) Pinjaman Daerah.
- 4) Penerimaan lain-lain yang sah.

Dalam tulisan ini hanya akan di fokuskan pada penerimaan pendapatan daerah dari sumber daya alam. Hal ini berkaitan dengan penyusunan skripsi yang membahas tentang pengelolaan hutan

Dalam memenuhi kebutuhannya pemerintah daerah diberi kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Seperti yang tertuang dalam undang-undang No.22 Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada bab VIII tentang keuangan Daerah Pasal 80 ayat 1 dana perimbangan, sebagai yang dimaksud dalam pasal 79, terdiri atas: Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumberdaya alam. Kemudian dalam undang-undang No.25 Th.1999 tentang Perimbangan Penerimaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Bab III tentang Sumber-Sumber Penerimaan Pelaksanaan Desentralisasi Pasal 6 ayat 5 dikatakan bahwa penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, serktor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbang 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.¹³Hal ini diperinci lagi dalam penjelasan undang- undang No. 25 Th. 1999. Dari 80% itu bagian Propinsi sebesar 16 %, bagian Kabupaten/ Kota

¹³ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999* (Jakarta: Sinar Grafika,2001), hal 101

penghasil sebesar 32 %, bagian Kabupaten / Kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan sebesar 32%.

Dengan adanya otonomi daerah bukan berarti tidak memunculkan masalah baru. Salah satunya adalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi. Banyak hutan yang rusak bahkan hilang akibat eksploitasi yang berlebihan tanpa memperhatikan kelestariannya. Hal ini dapat mengakibatkan erosi dan bertambah luasnya tanah kritis, yang akan berakibat pada makin tingginya kandungan lumpur dalam air sungai, lumpur akan mengendap di hilir dan hulu sungai sehingga akan menghambat aliran air. Dengan terhambatnya aliran sungai maka kemungkinan terjadinya banjir sangat besar. Rusaknya hutan juga akan berakibat pada hilangnya plasma nutfah, habitat satwa, keindahan, dan berbagai fungsi hutan lainnya.

Ketika otonomi daerah benar-benar diberlakukan mulai awal tahun 2000, banyak pihak yang bersilang pendapat. Sebagian besar pihak masih ragu-ragu mengingat sumber daya manusia dan sarana-prasarana daerah yang masih kurang siap, sekalipun perangkat undang-undangnya sudah ada. Sementara sebagian besar pihak yang lain menyambut dengan sangat gembira diberlakukannya otonomi daerah.¹⁴

Seperti halnya di daerah lain ketika otonomi daerah diberlakukan di Kabupaten Temanggung, maka proses perjalanannya menyisakan kekhawatiran khususnya terhadap eksistensi hutan di daerah itu. Hal ini disebabkan sebagian besar mata pencaharian masyarakat Temanggung adalah petani tradisional. Dalam

¹⁴ San Afri Awang, dkk *Otonomi Sumberdaya Hutan* (Yogyakarta: Debut Press, 2001), hal. v.

pola pikir masyarakat petani tradisional bahwa semakin luas lahan pertanian maka hasil yang didapat juga akan semakin banyak, maka mereka akan berlomba-lomba memperluas lahan mereka dengan penebangan hutan. Hal ini didasari bahwa bahan pangan dapat ditingkatkan melalui suatu perluasan ukuran tanah pertanian dengan maksud untuk memperoleh hasil per arce yang lebih besar.¹⁵

Pembukaan daerah hutan untuk lahan pertanian sebenarnya dapat dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan kelestarian sumberdaya alam. Salah satu usaha menjaga kelestarian hutan dari pembukaan lahan pertanian adalah dengan menghindari pola pertanian ladang berpindah dan mengintensifkan ladang yang sudah ada. Pembukaan daerah yang luas untuk kepentingan pertanian jika selamanya akan dikerjakan pertama-tama menghendaki diadakannya sejumlah riset yang intensif untuk menyingkirkan segala rintangan-rintangan yang ada.¹⁶

Kondisi hutan di Kabupaten Temanggung sangat memprihatinkan, hutan-hutan di daerah itu mengalami kegundulan tanaman akibat penebangan yang tidak memperhatikan kelestarian dan kelangsungan hutan. Sebagian besar penebangan dilakukan untuk diubah menjadi lahan pertanian ataupun perkebunan seperti tembakau, kopi, cengkih, dan rambutan. Masyarakat hanya memikirkan keuntungan semata tanpa melihat dampak yang di timbulkan. Perladangan berpindah merupakan cara bercocok tanam yang tidak produktif dan bersifat

¹⁵ David M. Heer, *Masalah Kependudukan Di Negara Berkembang*, penyadur RG Kartosapoetro dan G Kartosapoetro (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1985), hal.31.

¹⁶ David M. Heer, *Ibid.*, hal.32.

destruktif karena mengakibatkan kerusakan sumberdaya alam hutan, tanah dan air.¹⁷

Penebangan ini pada mulanya hanya sekedar pencurian kayu kecil-kecilan dan maksimal pada penyerobotan lahan hutan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Adanya perubahan peta politik di Indonesia pada era reformasi yang diharapkan bisa memperbaiki sektor kehutanan, justru memacu pencurian ini dan berubah menjadi penjarahan secara besar-besaran hal ini terjadi pada tahun 1997-1999.

Akibat dari pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan tantangan terhadap usaha kehutanan, hal ini secara nyata sangat mengancam kelestarian sumber daya hutan. Merebaknya konflik sosial, meningkatnya praktek penebangan liar, penyelundupan kayu, ketidakpastian hukum dan lemahnya stabilitas keamanan merupakan beberapa faktor utama yang mempengaruhi kerusakan hutan.¹⁸

Pengelolaan hutan pada dasarnya telah dilakukan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu, akan tetapi seiring dengan perubahan zaman maka sistem pengelolaan hutan ikut berubah pula. Pengelolaan hutan yang dilakukan pemerintah selama ini, dari segi ekonomi, memang sangat menguntungkan, akan tetapi jika dilihat dari segi kelestarian lingkungan akan sangat merugikan. Pengelolaan hutan yang dilakukan pemerintah selama ini kecenderungannya justru memburuk, kebakaran hutan masih sering terjadi, meningkatnya penebangan liar, dan dibukanya penambangan. Keterpurukan sektor kehutanan

¹⁷ Direktorat Jendral Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan, *Himpunan Makalah Raker Kehutanan* (Jakarta: Departemen Kehutanan, 1984), hal. 37.

¹⁸ Agung Nugraha, *Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat Di Era Otonomi Daerah: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Bisnis*, dalam Editor San Afri Awang, dkk. *Otonomi Sumber Daya Hutan* (Yogyakarta: Debut Press, 2001), hal. 113.

bersumber dari sistem pengelolaan yang bersifat sentralistik, monopolistik serta mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga menyebabkan makin parahnya kerusakan hutan.

Kecemasan akan keberadaan sektor kehutanan tersebut sebenarnya sangat beralasan. Berbagai tantangan yang muncul dalam pembahasan eksistensi hutan sebagai paru-paru dunia terus bergulir seiring dengan penurunannya keberadaan hutan itu sendiri. Sementara negara Indonesia merupakan salah satu fokus perhatian dunia yang mencemaskan keberadaan hutannya, terutama dalam pengelolaannya secara berkelanjutan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pengelolaan hutan dalam era otonomi daerah di Kabupaten Temanggung sehingga dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengelolaan hutan di daerah Kabupaten Temanggung dalam era otonomi daerah sehingga dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti akan memberikan pengalaman yang sangat berharga tentang penelitian keberadaan hutan.
- b. Bagi masyarakat kabupaten Temanggung , untuk memberikan informasi tentang arti penting keberadaan hutan dan pengelolaannya.
- c. Bagi dunia pendidikan akan memberikan alternatif lain sebagai sumber pembelajaran di Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah mata pelajaran Biologi pokok bahasan ekologi .

E. Kerangka Teori

1. Otonomi Daerah

Menurut Faisal Bahri hakikat dari otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terkuaknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal.¹⁹ Dalam otonomi individu-individu merupakan komponen penting yang menjadi modal dasar dalam perwujudan otonomi, sehingga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam aturan tertentu yang telah di sepakati bersama bagi pelaku otonomi merupakan tindakan tepat bagi terselenggaranya sebuah otonomi. Otonomi juga memberikan peluang bagi tiap daerah untuk bersaing dalam pengelolaan daerahnya sehingga daerahnya tidak dipandang masih belum mampu untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri.

¹⁹ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Yantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia* (Jakarta: Erlangga,2002), hal. 174.

Pada tingkat paling rendah, otonomi mengacu pada individu sebagai perwujudan dari *free will* yang melekat pada diri manusia sebagai salah satu anugrah paling berharga dari Sang Pencipta. *Free will* inilah yang memungkinkan individu menjadi otonom (*autonomy of individual*) sehingga mereka bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada di dalam dirinya secara optimal. Individu yang otonom inilah yang selanjutnya membentuk komunitas yang otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul dengan kemampuan untuk mengaktualisasikan potensi keunikannya secara optimal.²⁰

Menurut Faisal Bahri bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah untuk dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang pernah dimilikinya secara optimal.²¹

Sebagai pelaku otonomi suatu daerah harus mampu untuk memanfaatkan segala potensi yang ada terutama potensi yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Daerah yang mempunyai suatu kelebihan dibanding dengan daerah lain belum tentu unggul dengan daerah lainnya, jika daerah itu tidak mampu memanfaatkan kelebihan daerahnya. Berikut beberapa prasyarat yang dibutuhkan untuk menyiapkan daerah-daerah menjadi pelaku aktif dalam kancan pasar global:

1. Terjaminnya pergerakan bebas dari seluruh faktor produksi, barang, dan jasa di dalam wilayah Indonesia, kecuali untuk kasus yang dilandasi oleh argumen non ekonomi.

²⁰ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 176

²¹ Faisal Basri, *Ibid*, hal. 177.

2. Proses politik yang juga menjamin keotonomian masyarakat lokal dalam menentukan dan memperjuangkan aspirasi mereka melalui partisipasi politik dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada publik.
3. Tegaknya *good government* baik di pusat atau di daerah, sehingga otonomi daerah tidak menciptakan bentuk KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) baru.
4. Keterbukaan daerah untuk bekerjasama dengan daerah lain tetangganya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada.
5. Fleksibilitas sistem intensif.
6. Peran pemerintah daerah lebih sebagai regulator yang bertujuan untuk melindungi kelompok minoritas dan lemah serta menjaga harmoni dengan alam sekitar, bukan regulator dalam pengertian serba mengatur.²²

2. Hutan

Hutan menurut kamus Bahasa Indonesia Kontemporer adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon liar “adj liar” ; tidak dipelihara orang.²³ Sedangkan mengenai ukuran luasnya, luas hutan minimal seperempat hektar.²⁴

Menurut Pringgodigdo yang dimaksud dengan hutan adalah kumpulan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon liar; dapat menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya. Hutan mempunyai arti penting dalam konservasi air dan binatang liar, pencegahan erosi, dan banjir serta tempat rekreasi.²⁵

Menurut Pringgodigdo berdasarkan bentuknya hutan dibagi menjadi:

²² Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 178-179.

²³ Petersalim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama* (Jakarta : Modern English Press, 1991), hal. 543.

²⁴*Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid ke-6 (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989), hal. 510.

²⁵ A.G Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum* (Jogjakarta: Kanisius, 1973), hal..530.

1. Hutan Hujan Katulistiwa atau Tropik yaitu hutan yang memperlihatkan tumbuhan yang rindang dari pada berbagai pohon-pohonan, terdapat di Afrika (Kongo), Asia Tenggara, Amerika (Brasilia).
2. Hutan Musim Panas atau Hutan Rontok merupakan hutan pertengahan yang daun-daunnya gugur selama musim dingin.
3. Hutan Coniferae ialah puncak pertumbuhan di daerah-daerah sebelah Utara garis lintang 40° di Indonesia ditemukan sebagai hutan Tusam (*Pinus merkusii*).

Melihat tinggi rendahnya dibedakan menjadi:

- a. Hutan Dataran Rendah (0-70m)
- b. Hutan Pegunungan (700-1500m)
- c. Hutan Sejuk (1500-3000m)
- d. Hutan Katai (lebih dari 3000m)

Hutan adalah suatu lapangan tumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.²⁶ Selain tumbuhan hutan juga di penuhi oleh berbagai jenis hewan dan mikroorganisme, antara lain serangga, lumut, reptilia, burung, bakteri dan jamur. Untuk tiap hutan mempunyai jenis organisme yang berbeda tergantung pada kondisi iklimnya. Selain sebagai tempat tinggal dan perlindungan organisme, hutan juga berfungsi untuk mencegah erosi, banjir dan untuk menyimpan air dalam tanah.

²⁶ *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta, PT.Cipta Adi Pustaka,1989), hal. 510

Berdasar status pemilikan, hutan di Indonesia dapat dibedakan dalam:

1. Hutan negara, yang dikelola dan dimiliki oleh negara, di bawah kekuasaan Departemen Kehutanan.
2. Hutan yang telah berabad-abad dimiliki oleh suku bangsa, misalnya hutan sagu milik suatu suku di Irian Jaya.
3. Hutan rakyat yang dikelola dan dimiliki oleh rakyat, umumnya ditumbuhi oleh pohon Jeungjing, dijumpai di banyak tempat di sekitar Cianjur, Sukabumi, dan Garut.²⁷

Berdasarkan sifat iklim, hutan dibedakan menjadi hutan hujan tropis, hutan musim dan hutan sabana.

1. Hutan hujan tropis terdapat di daerah yang beriklim basah, artinya menerima hujan sepanjang tahun. Hutan ini kebanyakan terbentang di kawasan Indonesia bagian barat.
2. Hutan musim terletak di daerah yang memiliki musim kemarau panjang dan curah hujan 1.000-2.000 milimeter per tahun. Tumbuhan di hutan ini didominasi oleh pohon yang akarnya menembus tanah sampai ke dalam, baik dari jenis gugur daun maupun selalu hijau.
3. Hutan sabana ditemukan di daerah dengan musim kemarau yang kering dan panjang. Pohon-pohonnya pendek dan jarang serta diselingi rumput-rumputan.

Berdasarkan fungsinya yang tercantum dalam Undang-undang Pokok Kehutanan, hutan dibagi menjadi empat jenis yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata.

²⁷ *Ibid*, hal. 513.

1. Hutan lindung adalah hutan yang mempunyai keadaan sedemikian rupa, sehingga berpengaruh terhadap tanah, alam sekelilingnya, dan tata air yang perlu dilindungi. Apabila hutan lindung ini diganggu, hutan ini akan kehilangan fungsinya sebagai pelindung, bahkan akan menimbulkan bencana alam seperti banjir dan erosi.
2. Hutan produksi ialah hutan yang karena keadaan alamnya maupun kemampuannya dapat memberikan manfaat produksi kayu dan hasil hutan lainnya.
3. Hutan suaka alam adalah kawasan hutan yang karena keadaan alamnya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
4. Hutan wisata ialah hutan yang karena keindahannya mempunyai kemampuan untuk dibina secara khusus untuk pariwisata dan / atau wisata buru.²⁸

3. Sumber Belajar

Sumber belajar untuk suatu ilmu pengetahuan tidak terbatas pada buku saja, akan tetapi kita bisa memanfaatkan alam atau lingkungan sekitar sebagai laboratorium yang tanpa batas, sehingga di dalam laboratorium ini dapat melakukan eksperimen, yang menurut ukuran dan bentuknya tidak mungkin dilakukan dalam gedung.²⁹

Alam sekitar merupakan laboratorium yang paling mudah ditemukan dan juga murah, dari laboratorium ini dapat memperoleh ilmu tanpa batas. Bahkan manusia akan bisa bertahan hidup dengan belajar dari alam. Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar dapat memberikan keuntungan jika obyeknya

²⁸ *Ibid*, hal.515-516.

²⁹ Subiyanto, *Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam* (Jakarta: PPLTK, 1986), hlm. 26

mudah dijangkau dan murah, siswa mudah mengenal alam lingkungannya, permasalahannya beraneka ragam, siswa dapat memperoleh informasi yang benar serta siswa dapat melakukan latihan observasi dan melakukan eksperimen yang merupakan kegiatan penting dalam kegiatan belajar biologi.³⁰

Meskipun alam merupakan gudangnya ilmu pengetahuan yang tanpa batas, bukan berarti kita dapat menggunakannya tanpa memperhatikan bagaimana kita bisa belajar semaksimal mungkin akan tetapi kita tidak merusak alam.

Djohar menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar dua ciri biologi yang perlu mendapat perhatian adalah: ciri sasaran materi dan ciri metodologinya. Melihat ciri biologi di atas akan memberi konsekuensi dalam memberi arti maupun menerapkan biologi dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, guru biologi harus mampu menyusun organisasi instruksional termasuk di dalamnya kemampuan seleksi sumber belajar, seleksi kondisi untuk penerapan program instruksional dan penguasaan prinsip pendidikan biologi, sehingga tidak mengherankan apabila di dalam proses belajar mengajar terdapat berbagai variasi.³¹

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan metode deskriptif. Metode ini menurut Traves (1978) bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari

³⁰Suthardi, *Pemanfaatan Alam Sebagai Sumber Belajar Anak Dalam Ilmu Hayat*, (Jakarta: Depdikbud, 1981), hlm.146.

³¹ Djohar, *IPA Dan Prinsip-Prinsip Pengajarannya*, (Yogyakarta: UUP IKIP Yogyakarta, 1972) hlm.102.

suatu gejala tertentu.³² Ada pendapat lain mengenai pengertian dari metode ini yakni menurut Gay, Metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlangsung proses riset.³³

Selain menggunakan metode deskriptif penulisan ini juga menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud metode kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset video, dan bahkan data yang telah di hitung untuk tujuan lain.³⁴

Menurut Anselm ada tiga unsur utama dalam penelitian kualitatif yakni

1. Data bisa berasal dari bermacam sumber biasanya berasal dari wawancara dan pengamatan.
2. Terdiri dari berbagai prosedur analisis dan interpretasi yang digunakan untuk mendapatkan temuan atau teori.
3. Laporan tertulis dan laporan lisan.³⁵

1. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah segala alat aktifitas yang dapat digunakan untuk menumpulkan data atau informasi yang diperlukan

³² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet Keempat, 2001), hal. 22.

³³ Husein Umar, *Ibid.*, hal. 25.

³⁴ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 5.

³⁵ Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 7.

dalam penelitian ini. Yang dimaksud dengan sumber data dalam sebuah penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.³⁶ Sumber data pada penelitian ini adalah Perum Perhutani yang terdapat di daerah kabupaten Temanggung dan Dinas Kehutanan Kabupaten Temanggung.

Guna memperlancar penelitian dan memperoleh data yang valid serta akurat maka penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yang dapat mendukung terlaksananya penelitian ini dengan baik. Dalam penelitian ini metode yang dipakai dalam pengumpulan data ialah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, legger, legenda, dan sebagainya.³⁷ Selain metode dokumentasi penulis juga akan menggunakan teknik wawancara, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.³⁸ Adapun pihak yang kami wawancarai adalah Ir. Untung Prabowo selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Temanggung, bapak Dewanto dan bapak Sutejo selaku pegawai Perum Perhutani.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode observasi, yaitu proses mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasikannya. Observasi juga dilakukan bila belum banyak keterangan dimiliki tentang masalah yang diteliti.

³⁶ Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi II, 1991), hal. 102.

³⁷ Muhamad Ali, *Penelitian Kependidikan* (Bandung: PT Angkasa, 1987), hal. 91.

³⁸ Dr. Suharsmi Arikunto, Loc. Cit., hal. 127.

Observasi juga diperlukan untuk menjajaknya, jadi berfungsi sebagai eksplorasi.³⁹

Dari hasil ini penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya.

2. Metode Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembahasan menggunakan metoda deskriptif.

- a. Deskriptif yaitu metode pembahasan yang digunakan untuk menganalisa dan memberikan interpretasi terhadap data-data yang dikumpulkan yang selanjutnya diperlukan kajian studi analitis.
- b. Analitis pada hakekatnya setiap penelitian atau penulisan ilmiah adalah erat kaitannya dengan proses menganalisis. Kegiatan analisis atau menganalisis ini adalah menyelidiki dan menguraikan istilah-istilah dengan isinya yang dipergunakan subyek yang sedang dibahas serta terhadap pernyataan-pernyataan yang berlaku. Dengan analisis ini diselidiki hal-hal yang tersurat dengan tujuan untuk menuai pengertian-pengertian tersebut di atas. Dengan metode ini penyusun melakukan pemeriksaan konsep-prinsip atas makna yang dikandungnya dan istilah-istilah yang digunakan dan pernyataan-pernyataan yang dibuat, kemudian dilakukan penyimpangan terhadap isi, dianalisis.⁴⁰

³⁹ Prof. Dr. S. Nasution, M.A., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hal. 106.

⁴⁰ Lois O. Kattsaf, *Pengantar Filsafat. Terj. Soejono Soemargono* (Yakarta: Tiara Wacana, 1992), hal. 222.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dalam pembahasannya terdiri dari empat bab, diawali dengan halaman formalis, yang terdiri dari halaman judul, halaman notadinas, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan kemudian di lanjutkan dengan bab yang terdiri dari sub bab, Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkannya seperti dibawah ini:

Bab I Pendahuluan berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang gambaran umum tentang daerah Kabupaten Temanggung dan gambaran umum tentang hutan di Kabupaten Temanggung, yang mencakup jenis hutan, luas area, letak geografis dan macam tanaman yang ada.

Bab III pada bab III akan di bahas tentang metode penelitian yang digunakan sebaga alternatif sumber pembelajaran bagi siswa sekolah menengah atau yang sederajat.

Bab IV bab ini berisi tentang pengelolaan hutan di daerah kabupaten Temanggung dalam era otonomi daerah.

Bab V bab ini memuat tentang pengelolaan hutan di daerah kabupaten Temanggung dalam era otonomi daerah sebagai sumber belajar.

Bab VI merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan, harapan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik sekarang maupun generasi yang akan datang.

Dari pemaparan di atas tentang pengelolaan hutan dalam era otonomi daerah di atas dapat kita simpulkan menjadi beberapa poin sebagai berikut :

1. Pengelolaan yang dilakukan oleh Perhutani dalam era otonomi daerah adalah Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, dimana masyarakat diperbolehkan melakukan penanaman tanaman semusim di sela tanaman pokok, dimana arealnya masih dikelola oleh Perhutani. Jadi dalam hal ini bahwa pengelolaan hutan milik Negara tidak semata-mata dikelola oleh pemerintah saja, akan tetapi pengelolaan hutan juga melibatkan peran serta dari masyarakat. Pengertian dari pengelolaan hutan bersama masyarakat sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan ketua dewan pengawas Perum Perhutani nomor 1365 bab I pasal 1 tentang pengelolaan hutan bersama masyarakat adalah sebagai berikut : suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa, atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang

berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara proporsional dan optimal.

2. Sedangkan pengelolaan hutan rakyat sepenuhnya diberikan pada masyarakat pemerintah hanya memberikan bantuan-bantuan baik materi maupun non materi demi kelestarian dan keberadaan hutan rakyat sebagai salah satu faktor penyangga ekosistem.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif sumber belajar Biologi di SMA maupun MA kelas x pokok bahasan ekosistem dan peranan manusia dalam keseimbangannya.
4. Dengan mengetahui bagaimana pengelolaan hutan maka siswa diharapkan mengetahui bagaimana menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan peranan materi dan energi serta peranan manusia dalam keseimbangannya. Hal ini sesuai dengan disiplin ilmu ekologi yang mempelajari tentang hubungan antara berbagai makhluk hidup dengan lingkungannya baik itu dalam satu spesies yang sama atau antar spesies yang berbeda serta hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

B. HARAPAN

Dari penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik untuk penulis, masyarakat luas maupun dunia pendidikan.

1. Bagi penulis pribadi akan memberikan pengalaman yang sangat berharga tentang penelitian keberadaan dan pengelolaan hutan.

2. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Temanggung, untuk memberikan informasi tentang arti penting keberadaan hutan dan pengelolaannya.
3. Bagi dunia pendidikan akan memberikan alternatif lain sebagai sumber pembelajaran sekaligus mampu menjadi sumbangan bagi kemajuan-kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.

C. SARAN-SARAN

Dari penulisan tersebut, dapatlah kiranya penulis memberikan saran dan masukan yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua :

1. Bagi Perhutani dan Dinas Perkebunan, Kehutanan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

Mengingat akan arti penting keberadaan hutan hendaknya Perhutani dan Dinas Kehutanan lebih mengintensifkan tentang pengelolaan hutan terutama dalam penjagaan keamanan dan pengendalian penebangan pohon agar tercapai pengelolaan yang maksimal.

2. Bagi masyarakat

Bahwasanya hutan yang merupakan kekayaan alam yang diberikan oleh Allah hendaknya dimanfaatkan sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sehingga dapat dimanfaatkan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Masyarakat harus melakukan penanaman dan perawatan hutan bukan hanya mengelola dalam artian memanfaatkan apa yang telah tersedia

misalnya melakukan penebangan pohon dan lupa untuk menanam kembali demi keberlanjutan hutan sebagai salah satu komponen ekosistem.

3. Bagi dunia pendidikan

Dalam kegiatan belajar mengajar terutama mata pelajaran biologi hendaknya lebih bervariasi dalam penyampaian materi, salah satu contoh adalah siswa dibawa ke luar kelas dan dihadapkan pada kenyataan yang ada sehingga mereka dapat belajar langsung dengan alam. Hal ini bertujuan agar siswa dapat menyadari tentang keberadaan hutan yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem.

Demikian penulisan skripsi ini kami buat, penulis yakin masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu dari penulis masih mengharapkan masukan dan saran bagi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G Pringgodigdo. 1973. *Ensiklopedi Umum*. Jogjakarta: Kanisius.
- , 1989. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid ke-6. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.
- Agung Nugraha. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat Di Era otonomi Daerah: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Bisnis*. ditor San Afri Awang, dkk. Otonom Sumberdaya Hutan. Yogyakarta: Debut Press.
- Anselm, S. dan Juliet, Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- C.Krustanto. 2001. *Proses Politik Dalam Mewujudkan Perda Tentang Kehutanan Masyarakat*. Editor. San Afri Awang dkk *Otonomi Sumberdaya Hutan* Hal. 107. Yogyakarta: Debut Press.
- Deddy Supriady Barata Kusumah dan Dadan Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- David M. Heer. 1985. *Masalah Kependudukan Di Negara Berkembang*, penyadur RG Kartosapoetro dan G Kartosapoetro. Jakarta: PT.Bina Aksara.
- Djohar. 1984. *Meningkatkan Daya Guna Dan Hasil Guna Pemanfaatan Sumber Belajar (Makalah Lokakarya Pengabdian Masyarakat)* Yogyakarta : PPM IKIP.

Husein Umar. 2001. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. cet. Ke empat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Iwayan Dirpha. 2001. *Strategi Delinasi Ulang Kawasan Lampung*. Editor San Afri Awang dkk *Otonomi Sumberdaya Hutan*. Yogyakarta: Debut Press.

..... 2001. *Perum Perhutani Pengelolaan Sumber Daya Hutan bersama Masyarakat, Jakarta,*

Lois O. Kattsaff, *Pengantar Filsafat*. 1992. Terj. Soejono Soemargono. Jakarta: Tiara Wacana.

Muhamad Ali, *Penelitian Kependidikan*. 1987. Bandung: PT Angkasa, 1987.

Pemda Temanggung, 2004. *Temanggung in figures Temanggung Dalam Angka*, BPS (Badan Pusat Statistik PEMDA Temanggung)

Petersalim dan Yenny Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama*. Jakarta : Modern English Press.

Pius A Partanto dan M Dahlan Al. Barry. 1994. *Buku Kamus Terlaris Kamus Populer*. Surabaya: Arloka.

..... 1999. *Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Jakarta. Perum Perhutani.

Redaksi Sinar Grafika. 200 *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999* Jakarta: Sinar Grafika.

San Afri Awang. dkk. 2001. *Otonomi Sumber Daya Hutan*. Yogyakarta: Debut Press.

Suharsmi Arikunto. 1991 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi II.

..... 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Di Propinsi Jawa Tengah*. Semarang: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

.....2002.*Petunjuk Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama*

Masyarakat Di Unit I Jawa Tengah. PT Perhutani (PERSERO)

Unit I Jawa Tengah Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PERUM PERHUTANI
(PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA)
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN KEDU UTARA
BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN CANDIROTO
Jln. Raya Parakan - Sukorejo No. 1 - 13 Candirototo

Telepon :
Fax :

Bank :
Bank Pembangunan Daerah

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 48/045.6/Cdrt/Kdu/I

Yang bertanda tangan dibawah ini Asper KBKPH Candirototo KPH Kedu Utara menerangkan bahwa :

N a m a : Athourokhman
N I M : 0045 0221
Mahasiswa : U I N
Prodik/Juridik : Fakultas Tarbiyah / UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di Perum Perhutani BKPH Candirototo KPH Kedu Utara yang dilaksanakan selama 2 bulan (Mei – Juni 2005) dengan judul :

“PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM ERA
OTONOMI DAERAH SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN BIOLOGI
POKOK BAHASAN EKOSISTEM “

Demikian surat keterangan ini kami buat, dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Candirototo, 26 Juli 2005



K.B.K.P.H. Candirototo

Dedi Supriadi, S.Hut

No. PP : 142 00 08



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN
DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**
Jl. Kadar Maron Telp 0815 7900257 Temanggung

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070...../277.9.../2005

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Perkebunan, Kehutanan dan KSDA Kabupaten Temanggung menerangkan bahwa :

Nama : Athourokhman
NIM : 0045 0221
Mahasiswa : UIN
Prodik/Jurdik : Fakultas Tarbiyah / UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di Dinas Perkebunan, Kehutanan dan KSDA Kabupaten Temanggung mulai tanggal 05 April 2005 dengan judul

“PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM ERA
OTONOMI DAERAH SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN BIOLOGI
POKOK BAHASAN EKOSISTEM”

Demikian surat keterangan ini kami buat, dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 25 Juli 2005

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KEHUTANAN
DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Yang Menjalankan Tugas



SLAMET SARYONO, SH. MM

Pembina
NIP. 500 082 478



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH
YOGYAKARTA

Jln. Marsda Adi Sucipto, Telp. : 513056 Yogyakarta; e-mail : ty-suka@yogya.wasantara.net.id

BUKTI SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Athourokhman
Nomor Induk : 00450221
Jurusan : Tadris Pendidikan Biologi
Semester ke : X [sepuluh]
Tahun Akademik : 2004/2005

Telah mengikut Seminar Proposal Riset Tanggal 13 Maret 2005

Judul Skripsi

PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM ERA OTONOMI DAERAH SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN BIOLOGI

Selanjutnya, kepada mahasiswa tersebut supaya berkonsultasi kepada pembimbingnya berdasarkan hasil-hasil seminar untuk penyempurnaan proposalnya itu.



Yogyakarta, 20 Maret 2005

Moderator

Drs. Sedyo Santoso, SS, M, Pd

NIP. 150 219 159



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, **29 MARET 2005.**

K e p a d a

Yth. **1. KA PERUM PERHUTANI UNIT I JATENG**
2. DINAS KEHUTANAN PROP. JATENG
DI - SEMARANG

Nomor : **070/376/III/2005.**
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : **BAPEDA DIY DI JOGYAKARTA**
Tanggal : **21 MARET 2005**
Nomor : **070/1445**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : **ATMO'URAKMAN**
A l a m a t : **JL MAREDA ADISUCIPTO YK**
Pekerjaan : **MAHASISWA**
Kebangsaan : **INDONESIA**

Bermaksud mengadakan **penelitian judul :**
" PENGELOLAAN HUTAN DI KAB TEMANGGUNG DALAM ERA OTONOMI DAERAH SEBAGAI
SUMBER PEMBELAJARAN BIOLOGI "

Penanggung Jawab : **ANDRIKA P NUGROHO MSI**
Peserta :
Lokasi : **KAB TEMANGGUNG**
W a k t u : **5 APRIL s/d 5 JULI 2005.**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774



PERUM PERHUTANI
(PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA)
UNIT I JAWA TENGAH
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN KEDU UTARA
Jln. Veteran No. 30 Magelang

Telepon : 0293 362252
Kawat : Perumhutkph
Fax : 0293 364991

Bank : BNI
BPD

Nomor : 393/016.5/Huga/Kdu/I.
Lampiran : - , -
Perihal : Persetujuan Izin Riset

Magelang, 02 APR 2005

Kepada Yth :
Asper / KBKPH Temanggung
di
Temanggung

Sehubungan surat dari Kepala Unit I Jawa tengah Cq. Kepala Biro SDM & Umum Nomor 1000/016./Um/I tanggal 30 Maret 2005 perihal Ijin Riset. Bersama ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan Saudara sebagai berikut :

1. Nama Mahasiswa : Athourokhman
NIM 00450221/Tarbiyah.
2. Judul : " Pengelolaan Hutan di Kabupaten Temanggung Dalam Era Oto
nomi Daerah Sebagai Sumber Pembelajaran Biologi "
3. Tempat dan Waktu : BKPH Temanggung.
Tanggal 5 April s/d 5 Juli 2005.
4. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Riset sepenuhnya menjadi
tanggung-jawab yang bersangkutan.
5. Setelah selesai melaksanakan Riset agar Saudara menyerahkan 1 (satu) buku laporan
hasil risetnya ke Perum Perhutani KPH Kedu Utara.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Administratur/KKPH
UNIT
JAWA TENGAH
Taufik Hidayat
NIP : 710 008 084.

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Ajun Adm/KSKPH Kedu Utara.
2. Ajun Adm/KTKU.
- ✓ 3. Sdr. Athourokhman.



PERUM PERHUTANI
(PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA)
UNIT I JAWA TENGAH

Alamat : Jalan Pahlawan No. 15 - 17 Kotak Pos 1272 Semarang 50241

Telepon : 024 - 8413631 (Hunting)
Kawat : Perumperhutunit
Fax. : 024 - 8443142

Bank : Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
Bank Pembangunan Daerah

Nomor : 1000.016.5/Uh/I
Lampiran : --
Perihal : Ijin Riset

Semarang,

30 MAR 2005

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di -

YOGYAKARTA.

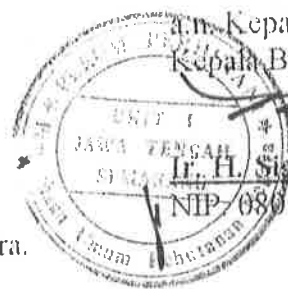
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : UIN/1/DT/TL.00/2008/2005 tanggal : 26-3-2005 perihal tersebut diatas dan surat Rekomendasi dari Kepala BADAN KESBANG LINMAS Propinsi Jawa Tengah Nomor : 070/376/III/2005 tanggal : 29-3-2005 maka bersama ini diberitahukan bahwa permohonan dapat disetujui sebagai berikut :

1. Nama mahasiswa : Athourokhrman,
NIM. 00450221/Tarbiyah
Judul : "Pengelolaan Hutan di Kabupaten Temanggung Dalam Era Otonomi Daerah Sebagai Sumber Pembelajaran Biologi".
2. Tempat & waktu : Perum Perhutani KPH.Kedu Utara,
Tanggal : 5-4-2005 s/d. 5-7-2005
3. Biaya menjadi beban mahasiswa yang bersangkutan.
4. Setelah selesai riset mahasiswa diminta menyerahkan laporan/hasil risetnya.
5. Selama melaksanakan riset di Perum Perhutani KPH.Kedu Utara tidak mengganggu kegiatan dinas.

Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Biro Pembinaan SDH.
2. Adm.Perum Perhutani/KKPH.Kedu Utara.
- ✓ 3. Sdr. Athourokhrman.





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 1445 Yogyakarta, 21 Maret 2005
Hal : Ijin Penelitian Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
c.q. Ka. Bakesbanglinmas
di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Tarbiyah - UIN "SUKA" Yk
Nomor : UIN//DT/TL.00/1807/2005
Tanggal : 19 Maret 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : **ATHO'URAKHMAN**
No. Mhs. : 00450221
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : **PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM ERA OTONOMI DAERAH SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN BIOLOGI**

Waktu : 21 Maret 2005 s/d 21 Juni 2005

Lokasi : Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Tarbiyah - UIN "SUKA" Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



Ir. H. NANANG SUWANDLIMMA

NIP. 490 022 448



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH
YOGYAKARTA

Jln. Marsda Adi Sucipto, Telp. : 513056 Yogyakarta; e-mail : ty-suka@yogya.wasantara.net.id

Nomor : UIN/ I/ DT/TL.00/1807/2005 Yogyakarta, 19 Maret 2005
Lamp :
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq Kepala BAPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM ERA OTONOMI DAERAH SEBAGAI SUMBER
PEMBELAJARAN BIOLOGI**

Kami mengharap dapatlah kiranya Bapak memberi izin bagi mahasiswa kami :

Nama : Athourokhman
No. Induk : 00150221
Semester : X (sepuluh) Jurusan : Tadris Pendidikan Biologi
Alamat : PP Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Perum Perhutani Kabupaten Temanggung
2. Dinas Kehutanan Kabupaten Temanggung

Metode pengumpulan data : Metode Dokumentasi
Adapun waktunya mulai tanggal 05 April 2005 s.d selesai.
Kemudian atas perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



[Signature]
Rahmat, M. Pd.
150037930

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Tadris
2. Mahasiswa yang bersangkutan (untuk dilaksanakan)
3. Arsip



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH
YOGYAKARTA

Jln. Marsda Adi Sucipto, Telp. : 513056 Yogyakarta; e-mail : ty-sukat@yogya.wasantara.net.id

Nomor : UIN/ 1/DT/TL.00/2009/2005 Yogyakarta, 26 Maret 2005
Lamp :
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perkebunan, Kehutanan Dan
Konservasi Sumber Daya Alam
di- Temanggung Jawa Tengah

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan
Skripsi dengan judul :

**PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM ERA OTONOMI DAERAH SEBAGAI SUMBER
PEMBELAJARAN BIOLOGI**

diperlukan riset, kami mengharap dapatlah kiranya Bapak memberi izin
bagi mahasiswa kami :

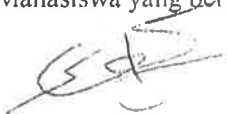
Nama : Athourokhman
No. Induk : 00450221 /Tarbiyah
Semester : X (sepuluh) Jurusan : Tadris Pendidikan Biologi
Alamat : PP Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta

untuk mengadakan penelitian di Dinas Perkebunan, Kehutanan Dan
Konservasi Sumberdaya Alam Temanggung.
Metode pengumpulan data : Metode Dokumentasi adapun waktunya
mulai tanggal 05 April 2005 s.d selesai.

Kemudian atas perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mahasiswa yang bertugas


Athourokhman
NIM. 00450221



DEKAN


H. Rahmat, M. Pd.
NIP. 150037930



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 29 MARET 2005.

Kepada

Yth. 1. KA PERUM PERUTANI UNIT I JATENG
2. DINAS KEMUTANAN PROP. JATENG
DI - SEMARANG

Nomor : 070/376/III/2005.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : BAPEDA DIY DI JOGYAKARTA
Tanggal : 21 MARET 2005
Nomor : 070/1445

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : AYO' WRAKIHAN
Alamat : JL. MARSDA ADISUCIPTO YK
Pekerjaan : MAHASISWA
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian judul :
" PENGELOLAAN HUTAN DI KAB TEMANGGUNG DALAM ERA OTONOMI DAERAH SEBAGAI
SUMBER PEMBELAJARAN BIOLOGI "

Penanggung Jawab : ANDHIKA P NUGRONO MS1
Peserta :
Lokasi : KAB TEMANGGUNG
Waktu : 5 APRIL s/a 5 JULI 2005.

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH
YOGYAKARTA

Jln. Marsda Adisucipto , Telp. : (0274) 513056 Fax. 519734 E-mail : ty-suka@Telkom.net

Yogyakarta, 12 Juli 2005

Nomor : UIN/1/ST/PP.00.9/4152/2005
Lamp. : 1 Eksemplar
Hal : **UNDANGAN**

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr. :

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Drs.H Sedyo Santosa ,S.S , M.Pd | Ketua |
| 2. Drs. Nurtono , M.Si | Sekretaris |
| 3. Andika P Nugroho , M.Si | Pembimbing Utama |
| 4. Drs. Sukiman , M.Pd | Penguji I |
| 5. Arifah Khusnuryani , M.Si | Penguji II |

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr selaku Panitia Ujian Munaqosyah pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 20 Juli 2005
Pukul : 10.00 - 11.30
Bertempat di : Ruang Munaqosah

Untuk melaksanakan Ujian Munaqosyah Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Athourokhman
NIM : 0045 0221
Jurusan : Tadris Pendidikan Biologi
Judul Skripsi : PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM ERA OTONOMI DAERAH SEBAGAI SUMBER
PEMBELAJARAN

Apabila Bapak/Ibu/Sdr. berhalangan hadir, diharap memberitahukan kepada Fakultas selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum Ujian Munaqosyah dilaksanakan.

Atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr. kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



an. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

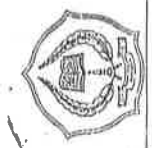
Drs. H. Atmaturida, M.Pd.
NIP. 150177857

Tembusan :

1. Kasubbag. Pengembangan Akademik & Pengembangan Kemahasiswaan
2. Mahasiswa Ybs. (sebagai undangan)

Yogyakarta, 25 Juni 2005

DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH
YOGYAKARTA



Jln. Marsda Adisucipto Telp. 513056 E-mail : ty-suka@telkom.net.

Lamp : 5 (lima) eks.
Hal : Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Tarbiyah
Cq. Ketua Jurusan
UIN Sunan Kaligaja
Di Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Athorokhman
NIM : 00450221
Fakultas : Tarbiyah
Jurusan : Tadris Biologi
Semester : X
Th. Akademik : 2004/2005

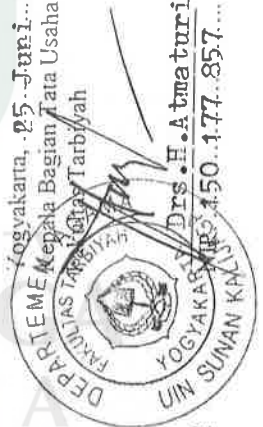
Telah menyelesaikan semua beban SKS dengan :

Nilai D sebanyak tanpa nilai E, telah menyelesaikan tugas
Praktek KKN, PPL I, PPL II, KKL,
IP Kumulatif 2,80

Telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti sidang munaqosyah.

Demikian azar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas Pengecek Nilai
Jurusan ... Biologi ..
Bardi S.Ag
NIP. 150.265.202



Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.
Pemohon
Athorokhman
NIM 0045 0221

PENGELUARAN HUTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM ERA OTONOMI DAERAH SEBAGAI SUMBER
PEMBELAJARAN

Menyatakan naskah skripsi berjudul :

Yang telah disetujui oleh Pembimbing (Nota Dinas terlampir)
Saya mohon penentuan waktu ujian munaqosyah
Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 59

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

Pasal 60

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.
- (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.

Pasal 61

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pasal 63

Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

Pasal 64

Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional.

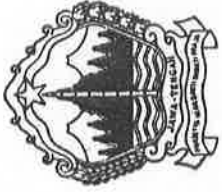
Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 66

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



**PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN
BERSAMA MASYARAKAT
DI PROPINSI JAWA TENGAH**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
SEMARANG
2001**



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 24 Tahun 2001**

TENTANG

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA
MASYARAKAT DI PROPINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin keberhasilan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan, perlu mengembangkan program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat;

b. bahwa berhubung dengan itu, agar pelaksanaan

berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat dengan keputusan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3888);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara

Tahun 1970 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 - 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 19);
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Januari 1998 Nomor 02 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Februari 1999 Nomor 02 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 11 Seri D Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG PEMGELOLAAN SUMBER DAYA
HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI PROPINSI
JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Tengah;
- b. Instansi adalah instansi Pemerintah yang terkait dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat, baik Propinsi maupun Kabupaten / Kota;
- c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
- d. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- e. Sumber daya hutan adalah benda hayati, nonhayati dan jasa yang terdapat di dalam hutan yang telah diketahui nilai pasar, kegunaan dan teknologi pemanfaatannya;
- f. Pengelolaan sumber daya hutan adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan suatu rencana yang matang dan lengkap, dimanfaatkan secara

arif dan bijaksana, perkembangan pemanfaatannya selalu dipantau dan dievaluasi, agar lebih diperoleh manfaat yang lestari dan optimal baik manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, maupun manfaat sosial;

- g. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat yang selanjutnya disingkat PHBM adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama dengan jiwa berbagi antara PT. Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional;
- h. Pihak yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat selain PT. Perhutani (Persero) dan masyarakat desa hutan, yaitu Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor;
- i. Berbagi adalah pembagian peran, hak dan tanggung jawab antara PT. Perhutani (Persero) dan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan lahan (tanah dan atau ruang), pemanfaatan waktu dan pengelolaan kegiatan;
- j. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah (Pusat) untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- k. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;

- l. Desa hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan;
- m. Masyarakat desa hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya;
- n. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
- o. Pengkajian desa partisipatif yang selanjutnya disingkat PDP adalah metode kajian terhadap kondisi desa dan masyarakat melalui proses pembelajaran bersama guna memberdayakan masyarakat desa yang bersangkutan agar memahami kondisi desa dan kehidupannya, sehingga mereka dapat berperan langsung dalam pembuatan rencana dan tindakan secara partisipatif;
- p. Perencanaan partisipatif adalah kegiatan merencanakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat oleh PT. Perhutani (Persero) dan masyarakat desa hutan atau PT. Perhutani (Persero) dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan, berdasarkan hasil pengkajian desa partisipatif dan kondisi sumber daya hutan dan lingkungan;
- q. Faktor produksi adalah semua unsur masukan produksi berupa lahan, tenaga kerja, teknologi, modal dan lain-lain, yang dapat mendukung terjadinya proses produksi sampai menghasilkan keluaran produksi dalam pengelolaan sumber daya hutan;
- r. Pola tanam adalah kegiatan pengaturan jarak tanam, jenis tanaman dan waktu tanam dalam reboisasi dengan memperhatikan aspek silvikultur dan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan;

s. Agroforestri adalah manajemen pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari, dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit pengolahan lahan yang sama, dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat berperan serta.

BAB II

JIWA DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

- (1) Jiwa yang terkandung dalam PHBM adalah kesediaan PT. Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan untuk berbagi dalam pengelolaan sumber daya hutan sesuai kaidah-kaidah keseimbangan, keberlanjutan, kesesuaian dan keselarasan.
- (2) Kegiatan PHBM dilakukan dengan jiwa berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, berbagi dalam pemanfaatan waktu, berbagi pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung.

Pasal 3

Prinsip dasar PHBM adalah :

- a. Keadilan dan demokratis;
- b. Keterbukaan dan kebersamaan;
- c. Pembelajaran bersama dan saling memahami;
- d. Kejelasan hak dan kewajiban;

- e. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- f. Kerja sama kelembagaan;
- g. Perencanaan partisipatif;
- h. Kesederhanaan sistem dan prosedur;
- i. Pemerintah sebagai fasilitator;
- j. Kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah dan keanekaragaman sosial budaya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumber daya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional.
- (2) Tujuan program PHBM yaitu :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat;
 - b. Meningkatkan peran dan tanggung jawab PT. Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan dan Pihak yang Berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan;
 - c. Meningkatkan mutu sumber daya hutan, produktivitas dan keamanan hutan;
 - d. Mendorong dan menyelaraskan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah dan sesuai kondisi dinamika sosial masyarakat desa hutan;

- e. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan PHBM dalam Kawasan Hutan meliputi :
 - a. Pengembangan agroforestri dengan pola bisnis;
 - b. Pengamanan hutan melalui pola berbagi hak, kewajiban dan tanggung jawab;
 - c. Tambang galian;
 - d. Wisata;
 - e. Pengembangan flora dan fauna;
 - f. Pemanfaatan sumber air.
- (3) Ruang lingkup kegiatan PHBM Luar Kawasan Hutan meliputi :
 - a. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan;
 - 1) Pemberdayaan kelembagaan Kelompok Tani Hutan;
 - 2) Pemberdayaan kelembagaan desa;
 - 3) Pengembangan ekonomi kerakyatan.
 - b. Perbaikan Biofisik Desa Hutan :
 - 1) Pengembangan hutan rakyat;
 - 2) Bantuan sarana dan prasarana desa hutan.

Pasal 6

PHBM dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan hasil perencanaan partisipatif.

Pasal 7

PHBM dilakukan dengan tidak mengubah status kawasan hutan dan status tanah PT. Perhutani (Persero).

BAB V PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Penyusunan bahan rencana kegiatan PHBM dilakukan oleh PT. Perhutani (Persero) bersama dengan masyarakat desa hutan melalui perencanaan partisipatif dengan studi diagnostik menggunakan metode PDP, yang dipadukan dengan analisis kemampuan daya dukung potensi wilayah.
- (2) Penyusunan bahan rencana PHBM dilakukan secara terintegrasi dan terpadu dengan pembangunan wilayah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan bahan rencana PHBM dalam kawasan hutan menjadi tugas dan tanggung jawab Administrator PT. Perhutani (Persero).
- (4) Penyusunan bahan rencana PHBM di luar kawasan hutan menjadi tugas dan tanggung jawab instansi terkait.
- (5) Penyusunan rencana PHBM dilakukan melalui pembahasan bersama

dalam Forum Komunikasi PHBM.

- (6) Dalam kondisi mendesak (*force majeure*), penyusunan rencana PHBM disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten / Kota.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 9

Tahap-tahap pelaksanaan PHBM meliputi :

- a. Pengenalan program (sosialisasi);
- b. Persiapan prakondisi sosial (PDP, pembentukan kelembagaan baik kelompok maupun Forum);
- c. Pelaksanaan program baik teknis maupun nonteknis (pemberdayaan masyarakat);
- d. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Masing-masing Instansi Pemerintah sesuai tugas dan fungsinya melakukan pemberdayaan secara intensif terhadap masyarakat yang terlibat dalam PHBM melalui pendekatan kelompok.

Pasal 11

Perangkat penyuluh lapangan masing-masing Instansi Pemerintah didayagunakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program PHBM.

BAB VII

KETENTUAN BERBAGI

Pasal 12

- (1) Sistem berbagi dalam PHBM berdasarkan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan.
- (2) Besarnya nilai berbagi yang akan diterima oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dihitung secara proporsional menurut kontribusinya.
- (3) Ketentuan berbagi dituangkan dalam suatu perjanjian PHBM.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Masyarakat desa hutan dalam PHBM berhak :
 - a. Bersama PT. Perhutani (Persero) dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PHBM;
 - b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan.
- (2) Masyarakat desa hutan dalam PHBM berkewajiban :
 - a. Bersama PT. Perhutani (Persero) dan pihak yang berkepentingan melindungi dan melestarikan sumber daya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya;
 - b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 14

(1) PT. Perhutani (Persero) dalam PHBM berhak :

- a. Bersama masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PHBM;
- b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya;
- c. Memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam perlindungan sumber daya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.

(2) PT. Perhutani (Persero) dalam PHBM berkewajiban :

- a. Memfasilitasi masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana;
- c. Mempersiapkan sistem, kultur dan budaya perusahaan yang kondusif;
- d. Bekerja sama dengan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.

Pasal 15

(1) Pemerintah Propinsi dan kabupaten / Kota dalam PHBM berhak :

- a. Memperoleh PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan berupa hasil hutan baik kayu maupun nonkayu (dalam bentuk uang) yang besarnya disesuaikan dengan kontribusi yang diberikan dalam pengelolaan sumber daya hutan.

2) Pemerintah Propinsi dan Kabupaten / Kota dalam PHBM berkewajiban :

- a. Membimbing dan memberdayakan masyarakat desa hutan;
- b. Mengamankan sumber daya hutan;
- c. Memfasilitasi kegiatan PHBM;
- d. Bersama-sama PT. Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.

BAB IX

FORUM KOMUNIKASI PHBM

Pasal 16

(1) Guna mendukung keberhasilan program PHBM perlu dibentuk Forum Komunikasi PHBM Propinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.

(2) Susunan Keanggotaan Forum Komunikasi PHBM Propinsi Jawa Tengah meliputi :

Penanggung jawab : Gubernur

Ketua

: Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.

Wakil Ketua

: Kepala PT. Perhutani (Persero) Unit I

Wakil Ketua

: Kepala Dinas Kehutanan.

Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Daerah Sekretaris Daerah
Wakil Sekretaris : Kepala Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan pada PT. Perhutani (Persero) Unit I.
Anggota : Dinas/instansi terkait Propinsi sesuai dengan kebutuhan.

(3) Susunan Forum Komunikasi PHBM Kabupaten / Kota meliputi :
Penanggung jawab : Bupati / Walikota.

Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kehutanan.

Sekretaris : Administrator PT. Perhutani (Persero).

Anggota : Dinas/instansi terkait Kabupaten / Kota sesuai dengan kebutuhan.

(4) Penyusunan Forum Komunikasi PHBM Kecamatan dan Desa / Kelurahan diserahkan kepada masing-masing Kabupaten / Kota.

(5) Tugas Forum Komunikasi PHBM adalah :

- a. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana PHBM;
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PHBM;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan PHBM;
- d. Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c kepada Gubernur bagi Forum Komunikasi PHBM Tingkat Propinsi, dan kepada Bupati / Walikota bagi Forum Komunikasi PHBM Tingkat Kabupaten / Kota.

(6) Guna membantu kelancaran pelaksanaan Program PHBM, maka Ketua Forum Komunikasi PHBM dapat membentuk Sekretariat

Tetap (SETAP) dan atau Kelompok Kerja (POKJA) PHBM sesuai dengan kebutuhan.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pemantauan proses pelaksanaan PHBM dilakukan secara berkala oleh PT. Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan, dan Pihak yang Berkepentingan dalam PHBM.
- (2) Evaluasi terhadap PHBM dilakukan sekurang - kurangnya 6 (enam) bulan sekali, oleh Forum Komunikasi pada tiap - tiap tingkatan.
- (3) Sasaran evaluasi dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Perkembangan kegiatan PHBM;
 - b. Tingkat kesejahteraan KTH;
 - c. Tingkat kelestarian sumber daya hutan;
 - d. Peran dan tanggung jawab PT. Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam PHBM;
 - e. Dampak program PHBM terhadap masyarakat dan lingkungannya.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Semua biaya PHBM di dalam kawasan hutan pada anggaran PT. Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah dan dana lainnya yang sah.

(2) Semua biaya PHBM di luar kawasan hutan dibebankan pada anggaran instansi: terkait melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, APBD Kabupaten / Kota, dan dana lainnya yang sah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.

Pasal 20

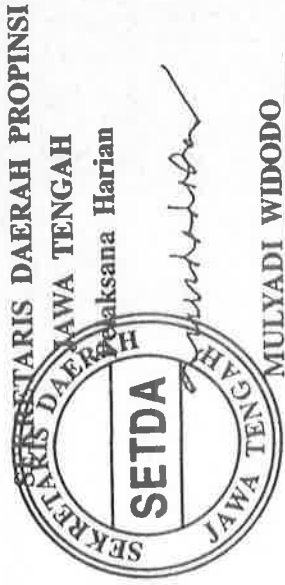
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 September 2001



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 September 2001



Wakil Gubernur Jawa Tengah
Bidang Kesejahteraan Rakyat

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001
NOMOR 43

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Athourakhman

Tempat tanggal lahir : Temanggung, 13 Juni 1981

Alamat :

- Asal : RT. 03 RW. 02 Desa Petirejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten
Temanggung 56255
- Jogja : PP. Nurul Ummah Prenggan Kotagede Yogyakarta

Pendidikan :

- Formal : 1. TK. Pertiwi lulus 1987
2. SDN Petirejo lulus 1993
3. SLTP Islam Ngadirejo lulus 1996
4. SMUN I Parakan lulus 1999
5. Jurusan Tadris Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga
- Non Formal : 1. Pondok Pesantren Nurul Ummah Prenggan Kotagede
Yogyakarta 55172.

Orang tua :

- Ayah : Abu Tamar
- Ibu : Suriyah